

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Penyidik Pegawai Negri Sipil Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Perspektif Hukum Indonesia.

1. Kendala-kendala

Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama sektor kehutanan. Kejahatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi berakibat, pada rusaknya kondisi hutan saat ini. Hutan yang sebenarnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil yang didapat dari hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama dari hutan. Serta berbagai hasil hutan seperti, rotan, getah, buah-buahan dan lain-lain. Selain manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, banyak lagi manfaat yang secara tidak langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat seperti, hutan yang dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi sebagai penyebab terjadinya banjir, dapat juga memberikan manfaat di sektor pariwisata dan lain-lain. Untuk itu perlu perlindungan yang maksimal terhadap hutan.

Melihat keadaan hutan di Indonesia yang semakin buruk pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menindak tegas semua pelaku tindak pidana *illegal logging*, keseriusan Pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dibuktikan dengan dikeluarkannya Inpres. No. 4 Tahun 2005. tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan, dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia. Dimana dalam Inpres No. 4 Tahun 2005. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada 18

Instansi untuk memberantas praktek *illegal logging* di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* selalu menemui hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikannya.

Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* ini antara lain:

- a. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum
- b. Pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana
- d. Keterbatasan dana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum yang mengatur tingkah laku manusia agar dapat tertib dalam berhubungan dengan sesamanya. UU 18 tahun 2013 merupakan landasan hukum untuk pembinaan dan pengembangan perlindungan hutan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan Pidana di dalam UU 18 Tahun 2013 menanggulangi akibat dari lahirnya suatu tindak pidana di bidang kehutanan. Luasnya kawasan hutan yang ada di wilayah Hukum Propinsi Lampung memang menjadi suatu kendala bagi aparat penegak hukum dan perlindungan hutan di Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung sebesar 1.004.735 Ha. Yang terdiri dari :

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| a. Kawasan Hutan Konservasi | : | 462.030 Ha |
| b. Kawasan Hutan Lindung | : | 317.615 Ha |
| c. Kawasan Hutan Produksi | : | 225.090 Ha |

Luasnya kawasan hutan yang ada di daerah Lampung ini tidak sebanding dengan jumlah personil pengamanan hutan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung jumlah Polisi Hutan yang ada di Dinas Propinsi Lampung pada tahun 2016 berjumlah 55 orang. Sedangkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung berjumlah 4 orang.

Dengan jumlah personil yang ada baik Polisi Hutan maupun Penyidik Pegawai Negri Sipil dengan luas hutan yang sangat luas tentunya hal ini sangat menyulitkan bagi aparat untuk menjaga hutan dan hasil hutan di Propinsi Lampung. Jumlah Penyidik Pegawai Negri Sipil ini dirasa sangat kurang mengingat banyaknya kasus-kasus Kehutanan khususnya Illegal Logging di Lampung. Dalam hal di daerah tertentu tidak tersedia Penyidik Pegawai Negri Sipil maka daerah dapat meminta bantuan tenaga penyidik dari Dinas Kehutanan Propinsi. Atau dapat menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada penyidik dari Kepolisian.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan *illegal logging*

a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah ,merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/ penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam upaya penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya represif sedangkan dalam upaya preventif lebih cenderung menjadi tanggungjawab dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya preventif dalam rangka pemberantasan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Propinsi Lampung.

Adapun langkah yang ditempuh pihak Dinas Kehutanan Propinsi Lampung sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan:

1) Memberikan himbauan kepada masyarakat

Himbauan- himbauan ini dapat dilakukan melalui media massa seperti media elektronik ataupun melalui media cetak seperti radio swasta dan surat kabar lokal. Himbauan-himbauan ini

juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan. Peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan hutan adalah merupakan salah satu jalan yang efektif dalam usaha pencapaian pembangunan hutan di Propinsi Lampung. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah orang yang berhubungan langsung dan hampir setiap hari bersentuhan dengan kawasan sekitar hutan.

2) Mendirikan pos peredaran pengangkutan hasil hutan

Selain dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat hukum adalah dengan mendirikan pos-pos peredaran hasil hutan. Pos ini didirikan di daerah perbatasan dan jalan lintas Propinsi yang biasanya dilewati oleh para pelaku untuk mengangkut hasil hutan yang tidak sah.

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Hutan(Polhut)

Pada saat sekarang ini tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serata peredaran hasil hutan ditumpukan kepada polisi hutan. Sementara gambaran keadaan Polisi Hutan saat ini menunjukkan gambaran yang ironis dan memprihatinkan bila dibandingkan dengan ratio luas kawasan hutan yang harus dijaga kemanannya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik *illegal logging* karena sebagian kawasan hutan luput dari pengawasan Polhut. Selain itu kualitas dan kuantitas dari SDM Polhut serta persepsi yang kurang baik terhadap Polhut yang disebabkan tindakan sebagian oknum Polhut yang tidak

terpuji dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan peredaran kayu termasuk menjadi penentu semakin maraknya praktik *illegal logging*.

b. Upaya represif

Kelestarian dan fungsi hutan adalah salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat maka perlindungan untuk mencapai tujuan tersebut pada hakekatnya bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah aparat penegak hukum melainkan tanggungjawab seluruh aspek kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkepentingan langsung dengan hutan. Oleh karena itu masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. Untuk itu pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengusahakan perlindungan terhadap kelestarian fungsi hutan tersebut yang salah satunya dilakukan dengan usaha represif.

Usaha represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam terjadi suatu peristiwa hukum yaitu laporan, pengaduan atau tertangkap tangan yang mengarah kepada dugaan telah terjadi tindak pidana *illegal logging*, yang kemudian oleh pihak yang berwenang akan dilakukan penyidikan terhadap orang yang diketahui sedang atau telah melakukan tindak pidana *illegal logging*, bila nantinya terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* pelaku ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Dengan ditangkapnya pelaku *illegal logging* tersebut diharapkan memberikan efek jera khususnya bagi pelaku sendiri dan memberikan rasa takut bagi masyarakat agar tidak mau lagi melakukan praktek *illegal logging* namun yang terjadi di

lapangan dalam pemberantasan tidak pidana illegal logging ini seringkali pihak aparat menemui kendala dalam menangkap pelaku yaitu ada kalanya yang ditemui kayu truk beserta dengan kayu yang diduga adalah hasil praktik illegal logging, namun yang membawa kayu tersebut (supir truk) tidak ada karena telah lari terlebih dahulu.

B. Peran Penyidik Pegawai Negri Sipil di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Perspektif Hukum Islam

Bencana alam yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktifitas manusia itu sendiri. Firman Allah SWT di dalam surat Al Qashash ayat 77 di dalam tafsir Quraish Shihab menekankan agar manusia tidak membuat kerusakan lingkungan dan senantiasa ramah terhadap lingkungan (environmen tal friendly) karena Allah SWT telah memberikan kepada manusia di bumi ini berbagai nikmat jadi berbuat baiklah semua pihak. Jika manusia sudah tergugah hatinya untuk peduli terhadap lingkungan, maka keseimbangan alam akan tercipta dengan baik.

Penyidik Pegawai Negri Sipil menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang dilindungi oleh Undang-undang dengan berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal melakukan penyidikan, penyidik kehutanan sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentan KUHAP. Dengan demikian penyidik Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang kehutanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian

merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ)

Artinya:

“Diriwayatkan al Bayhaqi dan al Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”.

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitium gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya

Dalam Islam lembaga yang berhak melakukan penyidikan adalah Al-Hisbah, Al-Hisbah sendiri mempunyai dasar hukum yaitu perbuatan Nabi sendiri. Tugas wilayah Al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas Al-Hisbah. Tugas hakim ialah menyuruh makruf dan mencegah munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, memutuskan perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah dan mengembalikan hak orang yang menang.

Berdasarkan pandangan di atas, maka analisis peran penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena peran PPNS telah sesuai dengan lembaga Islam dalam melakukan penyidikan yaitu sama-sama memelihara kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kekacauan yang terjadi di lingkungan masyarakat.